

ANALISIS JURNAL PERTEMUAN 10

NAMA : NASYWA MUTHI AZMI

NPM : 2413053205

KELAS : 2F

Demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” merupakan pondasi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakil yang mereka pilih, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai bentuk kearifan kolektif dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah, masih jauh dari ideal. Proses demokrasi yang seharusnya menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat sering kali justru dipenuhi dengan konflik, seperti praktik kecurangan, kampanye negatif, ujaran kebencian, serta rendahnya kesadaran demokratis di kalangan masyarakat.

Selain itu, dominasi partai politik dalam sistem pemilihan juga menjadi hambatan serius. Banyak partai tidak menerapkan prinsip demokratis dalam proses internalnya, sehingga pemilihan calon kepala daerah kerap didasarkan pada keputusan elite partai, bukan hasil permusyawaratan. Di sisi lain, calon independen yang seharusnya menjadi alternatif dalam memperluas partisipasi rakyat, justru dibebani oleh persyaratan yang berat, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak demokrasi partisipatif. Permasalahan ini diperparah oleh ketentuan hukum yang multitafsir dan tidak secara eksplisit menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam teknis pelaksanaan pemilu.

Partai politik seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, namun pada kenyataannya sering menjadi alat kekuasaan segelintir elit. Penunjukan calon secara sepihak tanpa mekanisme demokratis membuka ruang bagi praktik transaksional dan melemahkan legitimasi moral pemimpin yang terpilih. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih berjalan dalam koridor prosedural semata, belum menyentuh substansi nilai-nilai kebijaksanaan, kejujuran, dan keadilan yang termaktub dalam sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek pelaksanaan pemilihan umum agar demokrasi tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi benar-benar hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara.